BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi yang mutakir sangatlah menjunjang perekonomian Indonesia. Dengan adanya teknologi yang terbarukan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sebuah organisasi. Dalam penerapannya dibutuhkan sumber daya manusia yang handal agar dapat menjalankan sistem dengan baik. Teknologi dapat mempermudah dalam dunia bisnis, mampu memberikan informasi dengan mudah dan sangat cepat. Penggunaan teknologi yang menggunakan sistem akuntansi diharapkan menghasilkan manfaat bagi sektor swasta maupun sektor publik. Kinerja sektor publik sangatlah mempengaruhi kemajuan suatu bangsa.

Pemerintah dengan kerja keras selalu berupaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance*. Pengelolaan keuangan yang baik harus transparansi dan akuntabel. Upaya pemerintah untuk mewujudkannya yaitu dengan menyermpurnakan sistem administrasi pengelolaan keuangan.

Baru-baru ini, Kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan publik. Sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah, masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat yang ada belum puas merasakan kualitas atas barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memuat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini tidak harus mengalokasikan dana publik dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Tetapi untuk mengelola dana publik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. [1]

Beberapa permasalahan muncul berasal dari kinerja yang kurang efektif, hal ini dibuktikan banyaknya penyelewengan dana APBN dan APBD. Sekitar 30-40 persen dana menguap oleh kasus korupsi. Praktek korupsi menciptakan tingginya biaya ekonomi yang dibebankan kepada pelaku ekonomi. Semakin tingginya biaya ekonomi akan berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Dengan mahalnya harga maka akan menutupi kerugian ekonomi akibat besarnya modal yang diselewengkan.

Adapun untuk melihat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kita dapat mengetahuinya melalui Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Berikut ini pemaparan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019.

Tabel. 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	237.521.112.557,50	309.646.333.187
2016	287.185.436.564,50	342.577.551.088
2017	432.239.324.263,00	503.103.394.882,52

[1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2018	411.955.754.691,77	453.127.266.037,61
2019	446.692.297.984,88	486.360.900.761,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, data Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019, dapat diketahui mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di Tahun 2018 mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bentuk pencapaian sebuah organisasi sektor publik dalam menjalankan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Namun, pendapatan asli daerah tidak dapat sepenuhnya menjadi tolak ukur keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Terdapat indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan akuntabilitas dalam oranganisasi sektor publik.

Indikator keberhasilan akuntabilitas instansi pemerintah daerah, dapat diketahui dengan terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel. Oleh karena itu mekanisme akuntabilitas harus mengandung beberapa dimensi diantaranya akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program. Akuntabilitas hukum dinilai dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah diterapkan. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan ramah. Dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk

menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme. Sedangkan akuntabilitas program dapat diterjemahnkan dengan memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dari keempat dimensi akuntabilitas, kita dapat mengetahui indikator akuntabilitas sehingga dikatakan berhasil atau gagal didalam sebuah organisasi sektor publik.

Dari fenomena yang terjadi di lapangan, diketahui masih kurangnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tingkat kasus korupsi yang ada di indonesia. Pada dasarnya tanggungjawab telah tercantum dalam Al-Qur'an hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Anfaal/9:27 dan Q.S An-Nisa/4:58 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (٢٧)

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.[2]

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا (٥٨)

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

[2] Yayasan Peyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007) Al-Anfal (9;27) hal. 350

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.[3]

Berdasarkan kedua ayat tersebut mengandung artian bahwa, Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia, agar mereka selalu menjaga amanah yang didapat berupa sifat taqwa dan menjalankan perintah yang ditugaskan dan menjauhi segala larangan. Pengertian utama dari ayat ini menjelaskan bahwa orang yang telah diberikan amanat wajib mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ia telah lakukan.

Pemerintah daerah dalam menangani berbagai macam permasalahan yang ada dengan cara menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan sistem pengendalian internal pemerintah. Dimana sistem pengendalian internal tersebut guna dapat memberi keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem pengelolaan yang baik diperlukan agar dapat mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Yang mana pemrintah juga berkewajiban menginformasikan laporan anggaran kepada masyarakat.

Sistem pengendalian internal sangatlah mempengaruhi akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, maka suatu organisasi akan mencapai kinerja yang baik.

---

[3] Yayasan Peyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007) An-Nisa (4;58) hal. 168

Dalam mewujudkan sebuah keberhasilan akuntabilitas dalam sektor publik, perlu dibutuhkan suatu kejelasan atau tujuan anggaran yang telah direncanakan. Kejelasan sasaran anggaran dapat melaksanakan target-target sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, instansi pemerintah haruslah memiliki kejelasan sasaran anggaran yang jelas guna mewujudkan akuntabilitas dari lembaga sektor publik tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana terdapat variable-variabel dependen untuk dianalisa pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka penulis ingin meneliti dengan judul "**Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya menggunakan sistem pembukuan, saat ini dengan sistem teknologi yang lebih canggih.
2. Sistem Pengendalian Internal merupakan penopang untuk Penunjang Kinerja yang baik memenuhi tujuan suatu organisasi.

3. Kejelasan Sasaran anggaran dana dalam sebuah pemerintahan haruslah sesuai dengan tujuan
4. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
3. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
4. Apakah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
2. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

3. Untuk menguji pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
4. Untuk menguji pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama terhadap kajian mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dapat menunjang Keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Secara Praktis

   a. Bagi institusi

      Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi Pegawai Instansi Pemerintah. Selain itu, dapat dijadikan acuan dan masukan untuk meningkatkan kinerja mengoptimalkan fungsi dan peran informasi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, keintelektual bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik serta untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1 Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independent dalam penelitian ini yaitu Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2) dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan masalah diantaranya akuntabilitas Kinerja Instansi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni populasi yang kurang peduli terhadap masalah sosial, rendahnya standar gaji, sikap konsumerisme, faktor kultural, monopoli pemerintah, rendahnya sistem akuntansi, tidak tersedianya teknologi

yang cukup. Agar pokok bahasan dan lebih terperinci, maka keterbatasan penelitian ini adalah Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Penyusunan skripsi ini perlu adanya penegasan pengertian istilah yang terkadung didalamnya yang ditulis peneliti dari judul yang diangkat agar tidak terjadi kerancuan, kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dalam membaca dan memahami skripsi ini, dengan memberikan penegasan istilah baik secara konsep maupun secara operasional, berikut definisi konsep dan definisi operasional dari masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi Konseptual

   a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

      Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau yang disingkat SIPKD adalah sistem yang berupa aplikasi sebagai media atau alat yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas penerapan dari berbagai bidang pengelolaan keuangan daerah.[4]

[4] Kementrian Dalam Negeri,*Petunjuk Pelaksanaan SIPKD,*(Jakarta,2010)

b. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi, Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana hal ini bukan tujuan, melainkan bentuk kegiatan atau rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam suatu entitas atau kelompok.[5]

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinyu oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Internal merupakan aturan dan prosedur yang disusun untuk memberikan keyakinan bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern, SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dalam UU No.60 Tahun 2008 terdiri atas beberapa unsur diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian resiko, informasi dan komunikasi dan pemantauan.[6]

c. Kejelasan Sasaran Anggaran

Merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dimengerti oleh

---

[5] Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta:Salemba Empat, 2002), hal.30

[6] Nur Cholis,Fadli, *Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, Jurnal Akuntansi), hal.147

orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan.[7]

d. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai guna mencapai tujuan, diinformasikan melalui media yang berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.[8]

2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian, yang dimaksud dari pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran apakah ada atau tidaknya pengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

---

[7] Ummu Kaltsum, Abdul Rohman, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening*,(DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012),hal.2

[8] Agnestasia Laura Lumenta,dkk, *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* , (Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016), hal.137

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan definisi operasional.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Dan pada bab ini berisi sistem informasi pengelolaan keuangan, sistem pengendalian internal, akuntabilitas, kinerja instansi. Lalu berisikan penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan kerangka hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menerangkan tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, variable penelitian, dan sumber data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian lalu menguji data yang telah didapat dengan menggunakan SPSS setelah hasil pengolahan data

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisikan pembahasan yang mencangkup variabel

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Bagian akhir dari laporan ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran.